



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.1, Juni 2018

TURBULENSI KEPEMIMPINAN DAN KONEKTIVITAS ANTAR NEGARA

- Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un
- Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016
- Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia:
Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas
- Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia
- Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka:
City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

RESUME PENELITIAN

- Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

REVIEW BUKU

- Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 1	Hlm. 1-127	Jakarta, Juni 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un Indriana Kartini	1–13
• Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016 Meutya Viada Hafid	15–30
• Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas Arif Novianto, dkk	31–48
• Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia Siswanto	49–63
• Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka: <i>City to City Connectivity</i> sebagai Pendukung Koridor Ekonomi Awani Irewati	65–80
Resume Penelitian	
• Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk	81–96
• Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab M. Fakhry Ghafur, dkk	97–113
Review Buku	
• Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen Defbry Margiansyah	115–125
Tentang Penulis	127–128
Pedoman Penulisan	129–133

CATATAN REDAKSI

Kepemimpinan politik mengalami dinamika menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Tak pelak kondisi tersebut menimbulkan konsolidasi di tingkat kepemimpinan maupun justru sebaliknya menimbulkan turbulensi. Meski demikian, konsensus merupakan upaya yang mesti dilakukan dalam menjaga stabilitas nasional maupun hubungan antar negara.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan kepemimpinan. Artikel pertama yang ditulis oleh Indriana Kartini berjudul "DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN", menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom.

Artikel berikutnya, "KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016". Artikel yang ditulis oleh Meutya Viada Hafid ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016.

Sementara itu, artikel "DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS" yang ditulis oleh Arif Novianto, dkk mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme.

Turbulensi kepemimpinan di Amerika Serikat juga dibahas dalam artikel "KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA" yang ditulis oleh Siswanto. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Kebijakan membela kepentingan nasional (*America First*) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (*make America great again*) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian in-konsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Artikel terakhir membahas tentang "DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI" yang ditulis oleh

Awani Irewati. Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Selain kelima artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, dan Nostalgawan Wahyudi, “PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB”. Tulisan ini mengulas berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas

dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif.

Naskah kedua, “POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK”, ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, dan Yusuf Maulana. Tulisan ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Adam Bower “NORMS WITHOUT THE GREAT POWERS: INTERNATIONAL LAW AND CHANGING SOCIAL STANDARDS IN WORLD POLITICS”. *Review* yang ditulis Defbry Margiansyah menelaah tentang institusi internasional dan aturan-aturannya dekade belakangan dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana

dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemimpinan maupun konektivitas antar negara. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 1-13

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina.

Kata kunci: Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 15-30

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Mereka bertindak bukan hanya sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI, tetapi perubahan tersebut tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI

diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Kata kunci: Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan dan Samodra Wibawa

DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 31-48

Dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut.

Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tanggapan menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.

Kata kunci: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

DDC: 321.804273

Siswanto

KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 49-63

Latar belakang penulisan artikel ini didasari oleh pertimbangan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Selanjutnya masalah yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah kepribadian inkonsisten Presiden Donald Trump yang berpengaruh kepada lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversi. Kebijakan membela kepentingan nasional (America First) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (make America great again) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian inkonsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Kata kunci: kontroversi, turbulensi, kebijakan Amerika, Presiden Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 65-80

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Kata kunci: kerja sama subregional, *city to city connectivity*, koridor ekonomi, Selat Malaka

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

RESUME PENELITIAN
POLA PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA OTONOMI
KHUSUS DAN ISTIMEWA:
PERSPEKTIF POLITIK

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 81-96

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan

antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.

Kata kunci: pengawasan, dana otsus/istimewa, perspektif politik.

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

RESUME PENELITIAN
PROBLEMATIKA KEKUATAN
POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI,
KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 97-113

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh pendalaman,

penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antaranya melalui berbagai literatur, jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan di Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para pakar, akademisi di beberapa universitas, dan tokoh yang terkait dengan pokok kajian.

Kata kunci: Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

DDC: 341

Defbry Margiansyah

REVIEW BUKU

KEKUATAN SOSIAL HUKUM: MENUNDUKKAN NEGARA KEKUATAN BESAR MELALUI INSTITUSI MULTILATERAL INDEPENDEN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 115-125

Dalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku *Norms Without Great Powers* memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi

tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Kata kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau.

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

**PANMUNJOM DECLARATION AND
KOREAN PEACE PROSPECTS IN
MOON JAE-IN AND KIM JONG-UN
ERA**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 1-13

The Panmunjom Declaration signed by two Korean leaders, Moon Jae-in from South Korea and Kim Jong-un from North Korea marked a new era in peace on the Korean Peninsula. Although skepticism about positive implications has emerged both domestically and internationally, the commitment of the two Koreas to end the war should be appreciated by the international community. This paper analyzes how the Panmunjom Declaration influences regional and international security as well as the prospects for Korean peace and unification after the Panmunjom agreement. Based on the analysis through a qualitative approach, it can be concluded that although there were some similarities between the Panmunjom High Level Meeting and the previous High Level Meetings in 2000 and 2007, what needs to be underlined is the fact that the two Korean countries still have the desire to create a peace regime. Although in realizing this, the involvement of two allied countries in Korea, namely the US and China, is still needed.

Keywords: Panmunjom Declaration, Korean peace, South Korea, North Korea, Moon Jae-in, Kim Jong-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

**POLITICAL CONSENSUS ON
GOLKAR PARTY CONFLICT IN
2014-2016**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 15-30

This study discusses the phenomenon of political consensus of Golongan Karya (Golkar) Party after internal conflict in 2014-2016. The Golkar Party consensus is a new phenomenon, because the previous Golkar Party conflict has always brought new parties. The results of the study showed that the Golkar Party consensus occurred in the three stages. First stages through the organization's channels, namely the Golkar Party Court, the second through legal channels, the third through the political channels. The political channels shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub Golkar Party in May 2016. Munaslub agreed on various matters, including (1) the decision to set Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) the change of Golkar Party's position to the supporting party of Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The political consensus of Golkar Party in 2016 was also conducted through intermediaries. The intermediaries in the political consensus of Golkar Party are Jusuf Kalla and Luhut Panjaitan acting as government representatives and also as Golkar Party officials. The new Golkar Party Leaders also made changes in the Golkar faction of the House of Representatives. Unlike before where the losing faction was removed, the Chairman of the Golkar Party Faction was filled by Setya Novanto (from

Aburizal Bakrie faction) and Secretary of Golkar Party Faction filled by Agus Gumiwang Kartasasmita (from Agung Laksono faction). While the Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I and II are affected by the conflict at the Center, also reorganized by leaders of the new Golkar Party. In each DPD I and II, participatory discussion was conducted to elect the leaders of the Golkar Party DPD, in purpose to unify the two stewardship in the region. As for Aburizal Bakrie and Agung Laksono, each given a position on the management of the Golkar Party. Aburizal Bakrie was given the position as Chairman of the Advisory Council of Golkar Party which last appeared during the New Order; while Agung Laksono was given the position of Chairman of the Golkar Party Expert Council.

Keywords: Golkar Party, Political Consensus, Political Party, Indonesia

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan and Samodra Wibawa

DYNAMICS OF DEMOCRATIC PEOPLE PARTY (PRD) MOVEMENTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF REVOLUTIONARY PARTY AND BROAD-LEFT PARTY PERSPECTIVES

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 31-48

Within a Marxist tradition, social movements and social changes cannot be viewed as separated from the class contradictions and struggles as well as the roles played by mass organisations or parties. The current development of Marxism resulted in the emergence of two polar traditions in political parties, between those with a vanguardist or revolutionary leanings and those of social-democratic or broad-left leanings. These two tendencies have their own advantages and drawbacks depending on the circumstances in which they operated. This study attempts to elaborate the movement dynamics of People's Democratic Party (PRD) in their efforts to achieve the ideals of socialism which they championed. I divided the history of PRD into two different periods, between the New Order period in which they maintained a revolutionary-vanguard tendency and the post-Reformasi period in which there is a shift towards social-democratic tendency that emphasised Soekarnoist ideology. This study also tries to uncover the material basis behind such

changes. Analysing these changes is crucial because the shift in tendency influenced the changes in the strategies to oppose capitalism and the tactics to establish the various steps towards socialism.

Keywords: Marxism, People's Democratic Party, Revolutionary Party, Broad-Left Party

DDC: 321.804273

Siswanto

LEADERSHIP OF DONALD TRUMP AND TURBULENCE OF WORLD ORDER

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 49-63

The background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.

Keywords: controversy, turbulence, American policy, President of Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DYNAMIC OF SUB-REGIONAL COOPERATION IN MALACCA STRAITS: CITY TO CITY CONNECTIVITY AS A SUPPORTING ECONOMIC CORRIDOR

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 65-80

Connectivity is one of the important factors in building a cooperation at bilateral, regional and international levels. City to city connectivity realm becomes the backbone in an economic corridor of a subregional cooperation like IMT-GT. This article presents a review of the dynamics of the two economic corridors, namely Medan–Penang Island connectivity and Dumai–Melaka connectivity at the Straits of Malacca, and a little review of the future of city to city connectivity for Indonesia and Malaysia. The writing method of this article is based on qualitative analysis, with the essence of the findings are that as the smallest node in connectivity realm, these two connectivities determine the dynamics of the economic corridors between Indonesia and Malaysia. And this condition will remain as an determining factor for the sustainable cooperation between the two countries, and for subregional cooperation of the IMT-GT in the future.

Keywords: subregional cooperation, city to city connectivity, economic corridor, the straits of Malacca

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

SUMMARY RESEARCH
THE CONTROL PATTERN OF
SPECIAL FUND MANAGEMENT:
POLITICAL PERSPECTIVE

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 81-96

This study examines the special fund management control patterns from a political perspective. There are three areas studied namely, Aceh, Papua, and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). These three areas are important to be learned since they have specialization and privileges in fiscal management, particularly special fund management. However, central government oversight of special fund management is weak. This is evidenced by the lack of supervision in terms of synergy, coordination, supervision, and supervision between levels of government (province/district). As a result, special fund management does not have a significant impact on improving democratic and harmonious governance through vertical (central-local) or

horizontal (local-local) relationships and improving the welfare of local communities. Therefore, this study proves the importance of monitoring to special fund management. The research methods are conducted through collecting supporting documents, in-depth interviews, and focus group discussion.

Keywords: controlling, special fund, a political perspective

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

SUMMARY RESEARCH
PROBLEMS OF THE POWER OF
POLITICAL ISLAM IN SAUDI
ARABIA, KUWAIT AND UNI EMIRAT
ARAB

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 97-113

Political Islam has a significant influence for a political dynamics in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates. The Gulf War in 1991 has become catalyst for changes of monarchy policy, both internal and external. In Saudi Arabia the Islamist movement and their anti-liberal supporters took place during and after the war, which demanded change. While in Kuwait, the monarchy moves the opposition group. The formation of opposition Islamic Constitutional Movement (ICM) group against the government has attracted Muslim Brotherhood (IM) in a political conflict for reform. This is a challenge for ICM to gain wider political influence in the political constellation in Kuwait. While in the United Arab Emirates, the government claim the opposition as a threat for national security. The various of political Islam activities in Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates will be the focus of the research. The Research methods in this study used a qualitative methodology through deskriptive-analytical approach, fortified with the study literature and the fieldworks. To obtain deepening, this research begins by the searching of primary and secondary data through literature study. Among them through a various literature, journals, electronic media, well as the internet that provide important information for analysis and identify of map the Issues. To produce a sharp and accurate analysis, the studies the field research was conducted in Saudi Arabia (Jeddah, Mecca and Medina) through indepth interviews with experts,

academics at several universities and figures related with the subject matter.

Keywords: *Political Islam, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates*

DDC: 341

Defbry Margiansyah

BOOK REVIEW

THE SOCIAL POWER OF LAW: TAMING GREAT POWERS THROUGH INDEPENDENT MULTILATERAL INSTITUTIONS

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 115-125

For last decade, international institutions along with their rules have been perceived merely as an instrument for maintaining influences and interests of great power countries. However, Norms Without Great Powers offers novel theoretical account regarding the prospect for independent international institutions in the times of great powers ambivalence, such as United States, through the effects of “nested” social structure of international law. This research shows how social dimension of normative

international law shapes and restricts the behavior and expectation of the states in the conduct of international relations. The theoretical postulation drew on constructivist approach applied on empirical inquiry of of the Mine Ban Treaty and Rome Statute of International Criminal Court’s comparative case study. This article aims to highlight and review the book’s analysis critically. To this end, the critical review begins by elucidating main arguments, then providing presentation on main points of respective case studies. Finally theory-guided evaluation and its consequences on problems founds in the case of international law’s implementation promoted by “non-great power” multilateral institution will come up prior to concluding remarks.

Keywords: *Multilateralism, international law, norms, power politics, ICC, MBT*

DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI¹

DYNAMIC OF SUB-REGIONAL COOPERATION IN MALACCA STRAITS: CITY TO CITY CONNECTIVITY AS A SUPPORTING ECONOMIC CORRIDOR

Awani Irewati

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI)
Email: irewati62@gmail.com

Diterima: 4 Mei 2018, direvisi: 25 Mei 2018, disetujui: 26 Juni 2018

Abstract

Connectivity is one of the important factors in building a cooperation at bilateral, regional and international levels. City to city connectivity realm becomes the backbone in an economic corridor of a subregional cooperation like IMT-GT. This article presents a review of the dynamics of the two economic corridors, namely Medan–Penang Island connectivity and Dumai–Melaka connectivity at the Straits of Malacca, and a little review of the future of city to city connectivity for Indonesia and Malaysia. The writing method of this article is based on qualitative analysis, with the essence of the findings are that as the smallest node in connectivity realm, these two connectivities determine the dynamics of the economic corridors between Indonesia and Malaysia. And this condition will remain as an determining factor for the sustainable cooperation between the two countries, and for subregional cooperation of the IMT-GT in the future.

Keywords: *subregional cooperation, city to city connectivity, economic corridor, the straits of Malacca*

Abstrak

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Katakunci: kerja sama subregional, *city to city connectivity*, koridor ekonomi, Selat Malaka

¹ Artikel ini dibuat berdasarkan hasil penelitian Tim Perbatasan P2P LIPI yang dilakukan oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo (Koordinator), Awani Irewati, Agus R. Rahman, Tri Nuke Pudjiastuti, CPF Luhulima, dan Hayati Nufus pada tahun 2016. Pengembangan tulisan ini sebagian diambil dari bab yang ada didalamnya namun dilihat dari perspektif Indonesia.

Pendahuluan

Konektivitas (*connectivity*) menjadi kata kunci dalam era globalisasi. Konektivitas menjadi media bagi hantaran informasi berkecepatan kilat menembus ruang dan waktu, ‘menyatukan’ manusia dalam dunia tanpa batas. Konektivitas seperti inipun menjadi pendukung utama dalam sebuah hubungan kerja sama. Kecepatan komunikasi dalam pelayanan dan interaksi antarmasyarakat, utamanya pelaku ekonomi, semakin dituntut untuk membangun jaringan kerja sama, baik di level bilateral, regional, maupun internasional.

Tak terkecuali hubungan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, yang sudah terbangun sejak dahulu, dua negara inipun sudah membangun kerja sama disemua lini. Kerja sama di sosial budaya menjadi dasar bagi kerja sama lainnya, karena faktor kesamaan budaya dan bahasa relatif lebih mudah menyatukan dan mengeratkan hubungan antarmasyarakat antarnegara. Sama sama berlokasi di tepi Selat Malaka, yang sudah dikenal lama sebagai jalur lintas kapal dan pelayaran tersibuk di dunia, baik Indonesia maupun Malaysia tidak menutup mata bersaing membangun *city to city connectivity* antar mereka. Bersaing dalam membangun fasilitas-fasilitas publik dan turunannya, sehingga dapat mendorong kemudahan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pola *city to city connectivity* yang dibangun antara Medan – Pulau Penang, dan antara Dumai – Melaka yang berseberangan satu sama lain, terpisah dengan Selat Malaka menyajikan potret keterhubungan unik dan dinamis meski itu dipisahkan dengan sebuah selat yang cukup lebar. Mobilitas masyarakat yang pergi-pulang di kota-kota ini membuktikan bahwa laut sebagai pemisah tidak menjadi halangan besar bagi mereka. Bahkan konektivitas antar kota antar negara di perbatasan laut ini menjadi akses/penyambung juga bagi masyarakat dari kota-kota lain.

Konektivitas antarkota antarnegara diperbatasan laut ini tidak lepas dari kerangka kerja sama IMT GT (*Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle*) yang sudah dirintis sejak tahun 1993. Bentuk kerja sama subkawasan ini menjadi pendorong bagi kerja sama di *ASEAN*

Community. ASEAN sudah menetapkan *Master Plan on ASEAN Connectivity* yang berbasis pada 3 hal yaitu *infrastructur connectivity; institutional connectivity; people to people connectivity*. Ketiga hal ini menjadi kebutuhan mendasar bagi terbangunnya sebuah konektivitas ideal yang ingin dicapai dalam IMT GT maupun ASEAN *connectivity*. Tulisan ini membidik dinamika yang mewarnai *city to city connectivity* yang lebih melihat pada apa saja yang menjadi penggerak bagi terbangunnya sebuah konektivitas antarkota antarnegara di perbatasan laut (Selat Malaka) ini. Untuk itu, ada 2 pertanyaan mendasar yang memberi kerangka analisis dalam tulisan ini, yaitu 1). Peluang apa saja yang bisa menjadikan *city to city connectivity* ini menjadi penggerak bagi terbangunnya hubungan kerja sama dalam IMT GT; 2) Bagaimana masa depan hubungan ini bagi kedua negara dibawah masing-masing kepemimpinan Indonesia, khususnya di era akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan di era awal kepemimpinan Perdana Menteri terpilih Mahathir Muhammad?

Tulisan ini tersusun dari beberapa subbagian, yaitu *pertama*, diawali dengan pengantar; *kedua*, konsep konektivitas dalam kerangka ASEAN dan IMT GT; *ketiga*, dinamika *city to city connectivity*; *keempat*, masa depan hubungan *city to city connectivity* dibawah kepemimpinan masing-masing negara; *kelima*, penutup. Peluang dari pola *city to city connectivity* antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia yang ditampilkan oleh Medan–Pulau Penang dan Dumai–Melaka masih terbuka luas khususnya bagi pelaku ekonomi. Namun, rantai ekonomi yang tidak menyentuh masyarakat akar rumput bisa memicu gap ekonomi di masyarakat. Di masa depan kedua negara masih akan terus melihat pentingnya kedua simpul *city to city connectivity* sebagai penopang *crossborder maritime connectivity* dalam lingkup IMT-GT

Konsep Konektivitas dalam Konteks ASEAN dan IMT-GT

Makna Konektivitas dalam ASEAN

Sebelum mengkaitkan definisi kerja “konektivitas” dalam kerangka ASEAN maupun dalam kerja sama subkawasan IMT GT (*Indonesia-*

Malaysia-Thailand Growth Triangle), makna kata “konektivitas” atau “connectivity” menjadi penting untuk dikemukakan. Secara umum, kata “konektivitas” memiliki pengertian :

“is the ability to connect and maintain connection between two or more points in telecommunication system; the quality or condition of being connected or connective.”²

Definisi lainnya tentang “konektivitas” mengarah pada pengertian membangun upaya-upaya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh dua atau lebih negara-negara yang memiliki kedekatan geografis. Paparan definisi ini ditarik dalam konteks ASEAN menjadi sebuah keharusan apabila dikaitkan dengan narasi kesepakatan ASEAN atas “Master Plan on ASEAN Connectivity” (MPAC)³ tahun 2011 – 2015. Dalam konteks ini, konektivitas mengacu pada sejumlah rencana aksi melalui tiga pilar strategi, yaitu *pertama*, pembangunan infrastruktur fisik (*physical connectivity*) yang berfokus pada pengembangan sector transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan energi regional. *Kedua*, pembangunan kelembagaan termasuk mekanisme dan proses yang memadai (*institutional connectivity*), yang sarasanya menyelaraskan semua kebutuhan lintas barang, orang dan jasa secara mudah dan efektif-efisien di bawah harmonisasi prosedur dengan standar yang telah ditentukan. *Ketiga*, pembangunan masyarakat yang siap bersaing dengan kemampuan yang *adaptive* dan *prospective* (*people to people connectivity*), yang tak lepas dari kelanggengan interaksi social dan budaya masing-masing yang mampu menciptakan sikap apresiasi atas keberagaman di dalam ASEAN. Harapan dari konektivitas ini mampu menghantar lahirnya pertumbuhan ekonomi yang kurang lebih merata diantara tiga negara karena saling terbukanya penyerapan pasar satu sama lain.

²The Free Dictionary by Farlex, <http://www.thefreedictionary.com/connectivity>, diakses pada 20 September 2016.

³The ASEAN Secretariat, “Master Plan on ASEAN Connectivity”, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2011. The document can also be download from http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/4_Master_Plan_on_ASEAN_Connectivity.pdf, diakses pada 21 September 2016.

Yang terbaru tentang MPAC ini sudah ditetapkan hingga tahun 2025. Yang menjadi penekanan dalam MPAC terbaru terkait dengan “connectivity”, adalah sesuai dengan visinya “to achieve a seamlessly and comprehensively connected and integrated ASEAN that will promote competitiveness, inclusiveness, and a greater sense of Community”.⁴ Untuk mencapai visi itu, disusun beberapa strategi sebagaimana bisa dilihat pada skema di bawah ini.

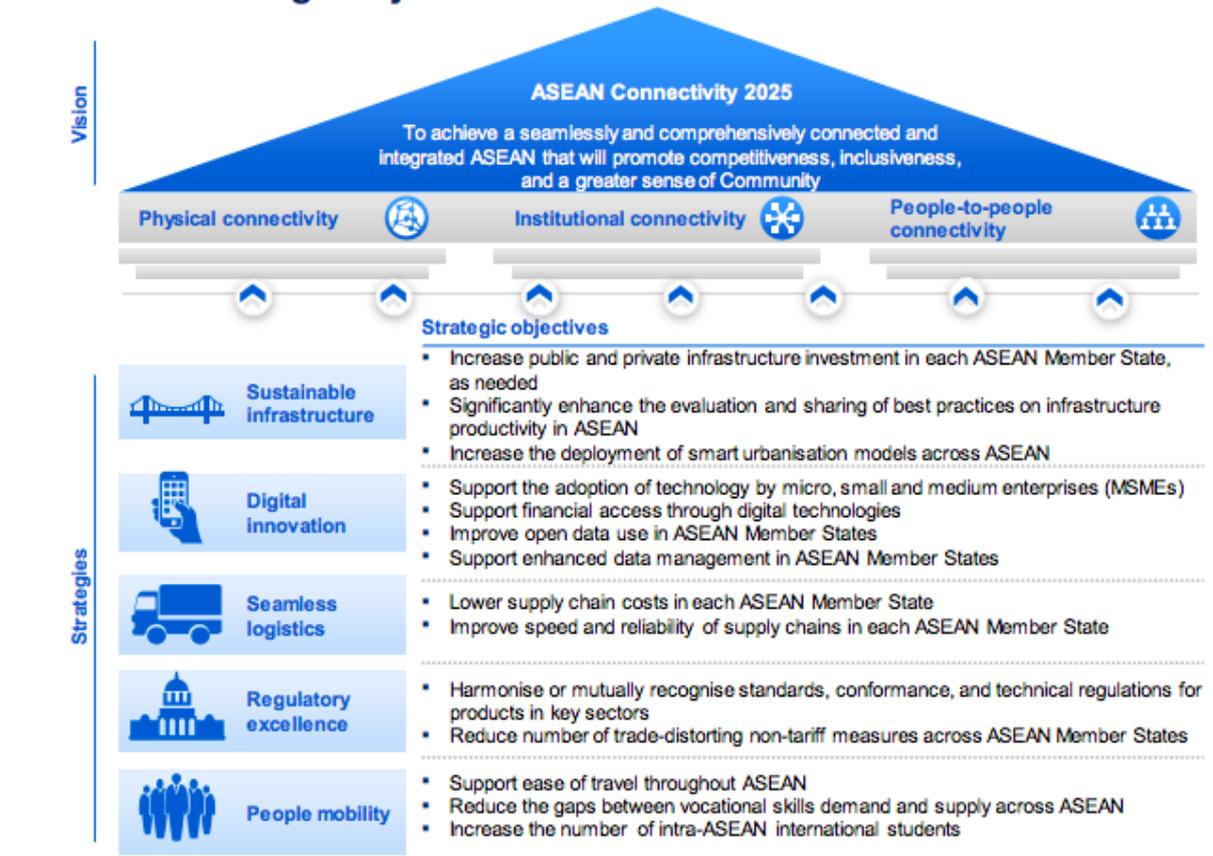
Salah satu strategi yang sedang dijalankan misalnya meningkatkan upaya evaluasi dan saling berbagi tentang pengalaman terbaik dalam hal pembangunan infrastruktur di ASEAN (*Significantly enhance the evaluation and sharing of best practices on infrastructure productivity in ASEAN*). Fakta menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, yang dikenal dengan nama *Asian Highway* (AH) sudah dilaksanakan diberbagai negara di ASEAN.⁵

Pembangunan jalan darat memang jauh lebih maju dari pembangunan konektivitas laut. Pembangunan konektivitas laut lebih digerakkan oleh adanya transportasi udara. Salah satu contoh, konektivitas laut yang menghubungkan kota Medan (Sumatera Utara, Indonesia) dengan Pulau Penang (George Town sebagai ibukota, di Semenanjung Malaysia) beberapa waktu lalu pernah dilakukan, namun tahun 2016 fasilitas transportasi laut itu dihentikan, dan lebih banyak difasilitasi dengan transportasi udara.

⁴The ASEAN Secretariat, “Master Plan on ASEAN Connectivity 2025”, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2016, hlm. 39. <http://asean.org/storage/2016/09/Master-Plan-on-ASEAN-Connectivity-20251.pdf>, diakses pada 15 April 2018.

⁵Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dari penulis dengan tim Perbatasan P2P LIPI yang melakukan perjalanan darat dari Kuala Lumpur (Malaysia) – Hat Yai (Thailand) sepanjang kurang lebih 550 km tahun 2016, serta perjalanan darat Pontianak (Kalbar) – Kuching (Sarawak) sepanjang 442 km, lalu Kuching – Brunei di tahun 2017.

Vision and strategic objectives



Gambar 1. Skema ASEAN Connectivity 2025

Sumber: The ASEAN Secretariat, “Master Plan on ASEAN Connectivity 2025”, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2016

Contoh lain adalah pembangunan konektivitas jalan *Asian Highway* di ASEAN utara yang menghubungkan negara-negara Vietnam–Laos–Thailand–Myanmar bahkan juga terhubung dengan 2 provinsi dari negara China.⁶ Kondisi jalan terbangun bagus, hanya ketika memasuki wilayah perbatasan Laos (setelah keluar dari wilayah Vietnam), kira-kira sepanjang 1 km kondisi jalan nampak banyak berlubang. Manfaat dari terbangunnya konektivitas jalan darat ini sangat membantu perputaran roda ekonomi masyarakat di masing-masing negara, meski ini tergantung dengan kondisi ekonomi negara bersangkutan. Setidaknya, dampak

dari pembangunan jalan memberi peluang bagi pergerakan ekonomi masyarakat seperti membuka fasilitas rumah makan, toko-toko kecil dan fasilitas lainnya di lokasi-lokasi pemberhentian kendaraan umum antarnegara.

Hal lain, dengan terbangunnya fasilitas infrastruktur ini memberi keuntungan dalam penghematan biaya transportasi logistik (ekspor-import) di negara anggota ASEAN (*Lower supply chain costs in each ASEAN Member State*). Kemudahan ini membawa pada waktu tempuh dan biaya bahan bakar yang relatif lebih pendek dan lebih hemat daripada sebelumnya (*Improve speed and reliability of supply chains in each ASEAN Member State*).

⁶ Berdasarkan perjalanan langsung penulis bersama tim Perbatasan P2P yang melakukan perjalanan darat dari Hanoi (Vietnam) – Savannakhet (Laos) – Bangkok (Thailand) Juni tahun 2015.

Demikian juga untuk segmen *people mobility*, tersedianya konektivitas darat ini cenderung meningkatkan mobilitas masyarakat antar negara untuk saling berkunjung baik itu untuk urusan pribadi maupun untuk urusan pekerjaan seperti urusan bisnis, sekolah, bahkan urusan wisata, tenaga kerja, dan wisata (*Support ease of travel throughout ASEAN*). Arus mobilitas ini juga dipermudah dengan pelayanan imigrasi, bea cukai yang terhubung dibawah satu sistem, meskipun diakui belum semua negara ASEAN terhubung dengan jaringan satu sistem ini. Harapan besar dari adanya arus *people mobility* akan terjadi proses interaksi dalam berbagai bidang, khususnya industri mikro yang membutuhkan tenaga kerja trampil ataupun pemasaran produk-produknya yang bisa dilempar ke negara tetangga sebagai souvenir yang dikemas dalam paket wisata. Hasilnya memang tidak akan instan namun secara bertahap akan bisa meningkatkan ketrampilan dari pelaku-pelaku ekonomi untuk lebih meningkatkan kualitas produknya, sesuai permintaan dari pasar (*Reduce the gaps between vocational skills demand and supply across ASEAN*).

Makna 'Konektivitas' dalam Konteks IMT-GT

Makna konektivitas dalam IMT-GT tidak berbeda dengan yang dicakup dalam MPAC di ASEAN. Penjelasan dalam subbagian ini lebih ditekankan pada basis wilayah yang menjadi wilayah kerja dalam IMT-GT. Membangun konektivitas juga diperjuangkan dalam kerangka kerja sama subkawasan yang lebih kecil daripada ASEAN, yaitu kerja sama IMT GT. Upaya membangun konektivitas, baik di ASEAN maupun di IMT GT tidak bisa dilihat terpisah, karena kerja sama semacam IMT GT (disamping BIMP EAGA, GMS, dan lainnya) justru dibutuhkan sebagai penggerak bagi kepentingan pencapaian target di ASEAN. Nathalie Fau dalam bukunya menyatakan "One of the MPAC objectives is to enhance regional connectivity by promoting sub-regional initiatives, which usually focus on less developed areas of the ASEAN region with less developed infrastructures."⁷

⁷Nathalie Fau, "Poor Maritime Connectivity in The Straits of Malacca", *The Newsletter*, No. 63, Spring 2013, http://www.iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL63_4041.pdf, diakses pada 21 September 2016.

Sependapat dengan apa yang dikemukakan Fau, dan penting juga ditekankan bahwa kedekatan letak geografi menjadi faktor penting, bahwa dengan keterhubungan darat akan relatif lebih mempermudah upaya membangun hubungan kerja sama dengan bobot kendala fisik yang lebih kecil.

Dalam konteks IMT-GT, melibatkan 3 negara lama di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Wilayah yang dicakup dalam bentuk kerja sama ini adalah wilayah-wilayah yang berada di tepi Selat Malaka. Mereka memiliki kedekatan geografi (*geography proximity*), dan hanya wilayah Indonesia saja yang dipisahkan dengan laut yakni Selat Malaka yang memisahkan bagian wilayah Indonesia di Sumatera dengan bagian wilayah Malaysia di Semenanjung Malaka dan bagian wilayah Thailand di Thailand selatan (bisa lihat peta 1).

IMT-GT yang dibentuk tahun 1993, kemudian dilahirkan kembali pada tahun 2007 dengan energi dan semangat baru menetapkan cakupan wilayah bagian dari masing-masing negara yang menjadi target dari kerja sama dan integrasi ekonomi ini. Semuanya ada 32 cakupan wilayah, yang terdiri dari:

- Indonesia (Sumatera) mencakup 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Lampung.
- Thailand mencakup 14 provinsi di bagian selatan, yaitu Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga, dan Phuket.
- Malaysia mencakup 8 negara bagian di Semenanjung Malaysia: Kedah, Perlis, Perak, Penang, Selangor, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan.

[iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL63_4041.pdf](http://www.iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL63_4041.pdf), diakses pada 21 September 2016.

Gambar 2. Cross Border Connectivity di Selat Malaka





Sumber: ADB, *Expanding Horizons: a Study on the Development of the Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Economic Connectivity Corridors*, IMT-GT Blue Print Implementation, 2012-2016 (peta kiri). IMT-GT, *Mid-Term Review of The IMT-GT Roadmap For Development: 2007-2011*, (Hua Hin: IMT-GT, 2009), yang dikutip juga dalam Sandy Nur Ikfal Raharjo (et all) Resume Penelitian “Peran Kerja Sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 1, Juni 2017.

Ada 5 koridor Konektivitas yang dibangun dalam IMT-GT, 1) Koridor Songkhla –Penang–Medan (*extended* Songkhla-Penang-Medan); 2) Koridor Selat Malaka (Strait of Malacca); 3) Koridor Banda Aceh–Medan–Dumai–Palembang; 4) Koridor Melaka–Dumai; 5) Koridor Ranong–Puket–Aceh (*Ranong-Puket-Aceh economic corridor*). Koridor yang dimaksud disini menunjuk pada koridor ekonomi, yang targetnya adalah meningkatkan gairah perekonomian di 3 negara ini, dengan menjadikan wilayah-wilayah cakupannya sebagai wilayah ekonomi yang dinamis. Makna ‘konektivitas’ dalam kerja sama IMT-GT dimaksudkan sebagai jalinan keterhubungan atas wilayah-wilayah kerja yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memberi kesempatan luas kepada sektor swasta sebagai “accelerator” (*private-sector led growth*). Sektor swasta di wilayah IMT-GT bisa saling melengkapi dan mendorong munculnya *comparative advantages* dari pelaku-pelaku ekonominya.⁸ Tujuan akhirnya mampu mengurangi jurang pembangunan di wilayah kerja IMT-GT. Dalam Blueprint IMT-GT 2017-2021 masih ditegaskan target kerja sama untuk terus mengurangi *development gaps* diantara mereka, dengan semangat yang dimiliki berdasarkan kekayaan sumber-sumber dayanya, sektor swasta yang dinamis, serta penyerapan pasarnya dengan 81 juta penduduk dengan dukungan kuat dari tiga pemerintahan negara. Dalam tulisan ini, dinamika dari simpul ekonomi yang ada pada 2 koridor ekonominya (Dumai-Melaka/koridor 1 dan Penang-Medan/koridor 4) menjadi penekanan kajian, khususnya dari perspektif Indonesia. Tentang ini dikaji pada subbagian 3 dari tulisan ini.

Konsep Subkawasan (Subregionalisme) dalam kerja Sama IMT-GT

Penggunaan terminologi subregionalisme pada faktanya menempel pada definisi kerja regionalisme. Terminologi Subregional dipakai pada sebuah lingkup kawasan yang lebih kecil

⁸ “The Context of IMT-GT Implementation Blueprint 2017-2021”, <http://imtgt.org/the-context-of-imt-gt-implementation-blueprint-2017-2021/> diakses pada 17 Juni 2018.

daripada lingkup regional. Contoh sederhananya adalah sebuah organisasi seperti ASEAN merupakan sebuah organisasi kerja sama level regional, sementara kerja sama seperti IMT-GT berada didalam ASEAN menjadi bentuk kerja sama level subregional.

Artatrana Gochhayat dalam tulisannya menjelaskan “regionalism” memiliki berbagai dimensi serta sering dipakai dengan istilah beragam seperti *region*, *regionalism*, *regionalization*, *regional cooperation* dan *regional integration*.⁹ Dijelaskan pula oleh Gochhayat bahwa menurut beberapa referensi pada dasarnya regionalism yang berasal dari kata “region” adalah direkat dengan adanya “geographical proximity dan contiguity” (Hurrel, 1995) dan mutual interdependence (Nye, 1965). Yang lain ada yang menambahkan keterikatan dengan *cultural homogeneity* dalam tingkat tertentu (Russet, 1967), dan ikatan komunitas (*sense of community*) (Deutsch et al., 1957). Disebutkan pula tentang pendapat lain bahwa faktor-faktor seperti *geography*, *regularity and intensity of interactions*, *shared regional perceptions*, *agency* (Travers, 2004)¹⁰ menjadi pengikat terbentuknya sebuah regionalism.

Dengan demikian regionalism merujuk pada proses dan struktur membangun region berdasarkan keterikatan ekonomi, politik, keamanan dan kondisi sosial budaya dengan pertimbangan kedekatan geografi (yang relatif lebih longgar). Istilah regionalism sering dipakai untuk menunjuk pada sebuah kerja sama kawasan (*regional cooperation*) maupun integrasi kawasan (*regional integration*). Menurut Gochhayat “In a general sense, we can say that regions, on the one hand, are territories within a state, occasionally crossing state borders. On the other hand, regions are particular areas of the world, covering a number of different sovereign states. There is no commonly accepted definition of what a region is”.¹¹

⁹ Artatrana Gochhayat, “Regionalism and sub-regionalism: A theoretical framework with special reference to India” *African Journal of Political Science and International Relations*, Vol. 8, 1 (Februari 2014), hlm. 10-26, https://www.academicjournals.org/article/article1393314864_Gochhayat.pdf.

¹⁰ Artatrana Gochhayat, “Regionalisme”

¹¹ Artatrana Gochhayat, “Regionalisme”

Kalau ditarik pada konteks “subregional” bermakna sama dengan “regional” namun penggunaan terminology “subregional” berlaku bagi sebuah kerja sama dengan wilayah kerja yang lebih kecil dengan ikatan identitas yang lebih dekat atau *a distinct identity*.¹² Pada hasil penelitian P2P LIPI juga menyimpulkan bahwa definisi kerja subregionalisme sesungguhnya masih melekat pada definisi kerja regionalisme, meski dalam lingkup ruang yang lebih kecil.¹³ Namun terlepas dari pandangan tentang ini semua, pembangunan ekonomi kawasan sebenarnya bisa dilihat dari seberapa dinamis hubungan antar koridor ekonomi, yang diindikasikan secara kasat mata dengan ramainya aktivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah koridor tersebut. Contoh sederhana dan yang paling mudah disimak adalah adanya pertokoan, misalnya outlet *duty free* yang tersedia di perbatasan dengan kualitas dan jenis barang-barang yang ditawarkan. Jenis dan kualitas barang akan mencerminkan daya beli dari masyarakat di perbatasan ataupun mereka yang melintas. Selain itu, kualitas dan jenis barang yang terbilang untuk kalangan menengah ke atas mungkin disesuaikan dengan daya beli dari orang-orang yang melintas batas ataupun *commuter* yang melintas setiap hari.

Melihat apa yang terjadi di simpul koridor ekonomi dalam IMT-GT menawarkan sebuah pemahaman seberapa mendalam mobilitas dan jenis aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya pelaku-pelaku ekonomi yang justru tanpa disadari mereka ini menjadi “engine of growth” bagi sebuah kerja sama subregional. Dengan kata lain, *city to city connectivity* bisa ditelisik sebagai upaya untuk memahami maksud tersebut di atas. Dan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dua simpul koridor ekonomi yaitu Medan–Penang dan Dumai–Melaka sangat menarik untuk ditelisik. Koridor ekonomi yang dipisahkan dengan perbatasan laut ini menjadi sebuah contoh.

¹² Secara politik bisa disebut sebagai “...a redressal of grievances in the subregion is known as sub-regionalism” sebagaimana dikutip dari <https://tklvch.wordpress.com/tag/sub-regionalism/>

¹³ Lihat: Sandy Nur Ikfal Raharjo (et all), research summary “The Role of IMT-GT Cooperation in The ASEAN Connectivity Development.” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2017). Di dalamnya juga menyitir pandangan dari Artatrana Gochhayat, “Regionalisme.....”

***City to City Connectivity* Berbasis pada Karakteristik Perbatasan**

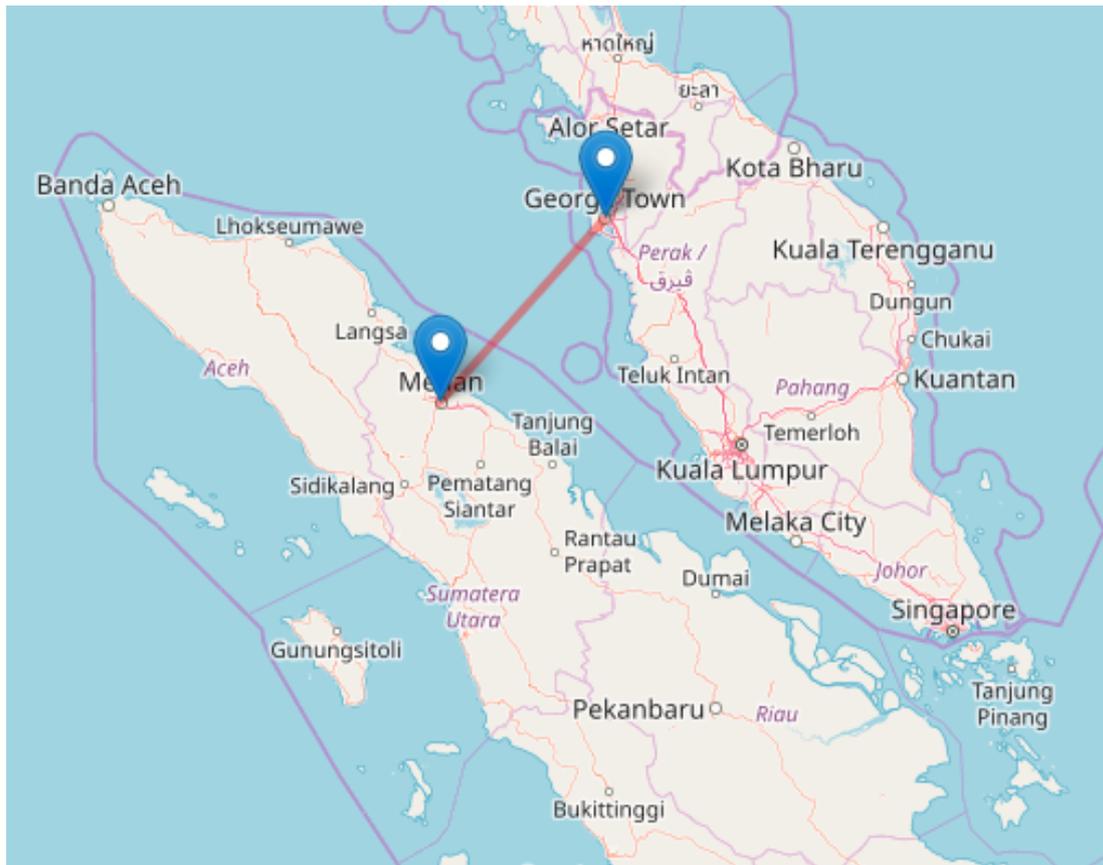
Dua simpul koridor mengapit Selat Malaka yang masing-masing berada pada dua daratan berbeda, kota tepi selat, kota perbatasan laut antarnegara yang sedari dulu sudah memiliki hubungan dagang. Nathalie Fau mengatakan “the originality of the Straits of Malacca is precisely the fact that it is both a zone of major exchange and transit in international commerce, in which nations situated along its coasts have always been deeply integrated, and a region in itself, shaped, despite the borders that separate the opposing coasts, by a tight web of commercial and cultural relations between the two coast”.¹⁴ Koridor Medan–Penang dan Dumai–Melaka dibawah kerangka IMT-GT menunjang apa yang sedang dilakukan oleh ASEAN dalam Rencana Induk Konektivitasnya.

Dinamika Medan – Pulau Penang Connectivity

Medan yang berlokasi di Sumatera Utara terhubung laut dengan Penang, dan menjadi jalur tradisional, terutama perniagaan sejak dahulu. Bahkan kalau disimak pada nama-nama jalan atau tempat di Penang masih lekat dengan nama-nama dari daerah Batak, Aceh maupun Bugis. Jejak nenek moyang di Penang tidak lepas dari turunan dari Medan maupun Aceh, bahkan Minangkabau. Sebelum Inggris datang ke Malaysiapun, sudah banyak orang-orang Indonesia yang berdatangan karena urusan perniagaan, merantau, pendidikan dan sebagainya. Hingga kini kalau kita telusuri ataupun bertemu dengan beberapa narasumber di Malaysia, banyak dari mereka yang berketurunan dari Minang Sumatera Barat.

Memang tidak bisa dipisahkan ketika berkisah tentang hubungan Penang dengan Medan karena memiliki ikatan sejarah kuat dengan Sumatera. Kedekatan mereka ini masih tetap dan tidak luntur hanya karena adanya pemisahan antara Semenanjung Malaysia dengan Sumatera sejak penandatanganan perjanjian Belanda-Inggris tahun 1824 (*Anglo-Deutch*

¹⁴ Nathalie Fau, “Maritime Corridors, Port System and Spatial Organization in the Malacca Straits”, Nathalie Fau, Sirivanh Khonathapane dkk, *Transnational Dynamics in Southeast Asia, the Greater Mekong Subregion and Malacca Straits Economic Corridors*, (Singapore: ISEAS, 2014), hlm.53-54.



Gambar 3. Peta Jarak Antara Medan – Penang *Connectivity*

Sumber: “Distance from Penang to Medan”, <https://www.distancefromto.net/distance-from-penang-to-medan-id>

Treaty). Sebenarnya kedekatan Penang ini tidak hanya dengan Medan, tetapi juga dengan Aceh ataupun beberapa kota lainnya. Kedekatan jarak Medan dengan Penang (274 km) menjadikan dua kota ini sebagai ‘jembatan’ penghubung antara Indonesia dan Semenanjung Malaysia.

Moda transportasi penghubungnya (bagi masyarakat) menggunakan kapal feri Ro-Ro dan pesawat udara. Namun beberapa tahun ini kapal feri dihentikan meski setahun terakhir ini sudah dibincangkan untuk dibuka kembali. Selama kegiatan penyeberangan kapal ini dihentikan, penyeberangan dari Penang menuju Langsa (Aceh) dibuka untuk 1 kali perjalanan, dan hanya 2 kali perjalanan dalam seminggu.¹⁵

¹⁵ Informasi dari Pelabuhan Belawan ketika tim peneliti melakukan observasi ke pelabuhan ini pada Mei 2016. Informasi yang sama juga bisa diperoleh dari Ferry dari Penang ke Medan. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu 5-6 jam.

Transportasi udara lebih banyak diminati selain lebih singkat perjalanannya (kurang lebih ditempuh dalam 30 menit) juga karena harga tiket yang terjangkau masyarakat, khususnya para pebisnis. Beberapa penerbangan komersial seperti Lion, AirAsia mendominasi jalur penerbangan ini. Beragam urusan seperti bisnis, studi, pengobatan adalah urusan-urusan yang sering dilakukan di Penang. Yang paling dikenal baik ketika banyak orang pergi menuju Penang adalah mayoritas urusan pemeriksaan kesehatan (*medical treatment*). Dan hampir menjadi *trademarck* bagi Malaysia dikenal dengan pelayanan kesehatan yang menjadi rujukan bagi masyarakat Sumatera, dan daerah lain, bahkan dari negara lain. Melihat banyak animo yang datang ke Malaysia untuk mendapat pelayanan kesehatan, Malaysia kemudian melekatkan sektor ini kedalam sebuah paket wisata dengan nama

medical tourism. Di sektor ini, “Malaysia has sent list of participating health care facilities and their medical specialties that are keen to participate in this project (17 health care facilities).”¹⁶ Sektor ini menjadi salah satu pendukung dinamika koridor ekonomi Medan – Penang yang menjadikan koridor ini penyanggah bagi konektivitas IMT-GT.

Berbagai komoditas dari Sumatera Utara dan sekitarnya banyak diekspor melalui Medan ke Pulau Penang, dan ini melanjutkan tradisi hubungan dagang seperti dulu. Keterbatasan lahan tanah membuat Pulau Penang membutuhkan kelangsungan suplai bahan makanan terutama sayur mayur. Dari jalur ekspor seperti sayur mayur (kol, wortel, buncis, kelapa bulat, kunyit, jahe, kentang, tomat, alpukat), biji Pinang dan sebagainya mencerminkan Provinsi Sumut melalui Medan menjadi faktor pendukung bagi nadi pangan Pulau Penang. Permintaan yang cenderung semakin meningkat ini mencerminkan semakin tingginya demand pasar dari perhotelan, rumah sakit, dan beragam wisata kuliner yang ada di Pulau Penang, yang membutuhkan kelangsungan pasok bahan makanan. Koridor ekonomi untuk ekspor hasil pertanian ini secara langsung dapat melanggengkan sektor pertanian yang menuntut pemerintah daerah untuk selalu mendukung melalui pemberian jaminan atas tersedianya lahan-lahan pertanian yang memadai.

Saat ini sudah semakin sulit dilakukan upaya penyediaan lahan-lahan pertanian yang terbentang luas, kecuali atas komitmen kuat dari pmdanya untuk tetap memelihara sektor ini tetap berproduksi. Tidak sedikit lahan-lahan pertanian yang berubah peruntukannya demi pengembangan kawasan industri, termasuk industri properti, perkebunan ataupun lainnya yang semakin pula memarginalkan kepentingan para petani. Tidak sedikit para petani yang terdesak dan kemudian akhirnya beralih fungsi menjadi kuli-kuli bangunan di kota-kota, maupun menjadi buruh-buruh pabrik yang menjadi lingkaran kapitalis. Maraknya pembukaan lahan hutan menjadi ladang kelapa sawit di satu sisi menguntungkan para pelaku bisnis, mengingat

¹⁶ “Health Tourism in IMT-GT Area”, in IMT-GT Project Map, https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ts4s2b1xSbQScFMEd8pNALcU9HA&hl=en_US diakses pada 08 Oktober 2016.

permintaan ekspor CPO dari Sumut ke Penang tinggi, namun di lain sisi terkait keseimbangan lingkungan hal ini kurang berdampak positif. Pembukaan hutan untuk penanaman kelapa sawit serta dampak pada keseimbangan lingkungan ini pada akhirnya bisa berujung pada terusnya kebutuhan dasar masyarakat.¹⁷

Namun demikian, pelaku-pelaku ekonomi nyatanya memang banyak menampilkan pelaku ekonomi menengah ke atas (*elite societies*). Masyarakat kebanyakan masih tetap sebagai lapisan masyarakat yang belum diceraikan perekonomiannya. Beberapa tahun silam hubungan kerja sama ekonomi antara Sumut dan Penang mengalami penurunan. Atas inisiatif KJRI di Penang, dibuatlah forum “Business Matching” antara Sumut–Penang yang diselenggarakan di Hotel St Giles Wembley di Penang pada awal Juli 2016. Tujuannya adalah mempertemukan para pengusaha muda dari kedua belah pihak agar bisa saling bertukar kontak untuk membangun kerja sama.¹⁸ Lebih kurang 120 pengusaha dengan beragam usaha dari sektor makanan, pakaian, produk kulit, kosmetik, pariwisata dan periklanan, rempah-rempah, kerajinan tangan hadir pada pertemuan ini.

Maraknya pembangunan hotel dan cottage di Penang dan di kota-kota lain Malaysia membuka peluang atas meningkatnya ekspor furniture kayu maupun bermacam handycraft asal Indonesia, khususnya dari Sumatera. Koridor ekonomi Medan - Penang semakin terbuka lebar bagi ekspor ini, dan salah satu bentuk keseriusan atas hal ini, Kerajaan Penang sudah memberi ijin kepada Kadin Sumut untuk membuka ruang pameran seluas 6.000 m di *Penang Time Square* sejak beberapa tahun yang lalu.¹⁹

¹⁷ Penanaman pohon kelapa sawit sebetulnya sangat banyak menyerap air tanah. Ini bisa berakibat pada keringnya sumber air tanah apabila musim kemarau tiba. Disamping itu, pembukaan lahan hutan sama artinya dengan “pemusnahan” habitat bagi hewan maupun biota lainnya. Hal semacam ini sudah lumrah terjadi di daerah-daerah yang membuka lahan hutannya untuk perkebunan kelapa sawit. Untung bagi industri kelapa sawit, buntung bagi keseimbangan alam.

¹⁸ “KJRI Gelar GELAR “Business Matching” Sumut-Pulau Penang”, *Harian Jurnal Asia*, <https://www.jurnalasia.com/seremoni/kjri-gelar-gelar-business-matching-sumut-pulau-penang/>, diakses pada 7 Oktober 2016

¹⁹ “Kadin Jateng Kerja Sama Pasarkan Furniture”, 23 Desember 2013 <http://www.yiela.com/view/3421640/kadin-jateng-kerja>

Hal lain yang menjadi peluang menguntungkan bagi Indonesia adalah Penang menjadi jalur ekspor bagi Sumut yang menawarkan kemudahan, karena ongkos pengiriman container ekspor Sumut melalui Penang relatif lebih murah daripada melalui pelabuhan Singapura. Biaya angkutnya bisa lebih murah 25 persen - 30 persen (tahun 2010) apabila lewat Penang, daripada melalui Singapura.²⁰ Ini tentu pilihan menguntungkan bagi Medan sebagai pintu ekspor semua produk Sumut, dan lainnya ke Malaysia untuk selanjutnya dikirim ke negara-negara tujuan ekspor seperti ASEAN, China, India dan sebagainya.

Dua spot koridor ekonomi Medan–Penang sudah berjalan jauh melewati dinamika antarmasyarakat berdasar pada tali kekerabatan itu sendiri. Koridor ini sudah menjadi pilar pendukung IMT-GT, yang justru memainkan perannya lebih dari sekedar pilar itu sendiri. Koridor ekonomi Medan–Penang mampu mengatasi kendala Selat Malaka sebagai pemisah dua daratan, dan karenanya “maritime cross border connectivity” sesungguhnya tidak menjadi penghalang utama, melainkan justru menjadi dorongan bagi kebutuhan dua wilayah, Sumatera Utara dan Semenanjung Malaysia.

Dinamika City to City Connectivity: Koridor Dumai–Melaka

Sama halnya dengan sejarah sebelum *Anglo-Deutch Treaty* 1842, keterhubungan masyarakat antar kedua kota ini telah terbina sejak masa dulu. Hubungan niaga, urusan sosial, pernikahan dan sebagainya sudah menyatukan kedua kota ini. Kalau melihat peta Selat Malaka, makin kedalam alur selatnya semakin menyempit. Jarak koridor antara Melaka dan Dumai (111 km), lebih pendek daripada jarak koridor antara Medan dan Pulau Penang. Kemungkinan jarak yang lebih dekat, maka moda transportasi laut dari Pelabuhan Dumai ke Port of Dickson tersedia 4 kali dalam seminggu. Frekuensi penyeberangan laut yang cukup tinggi ini mencerminkan mobilitas orang,

sama-pasarkan-furnitur, diakses pada 08 Oktober 2016.

²⁰“Kapal Ro-Ro Medan-Penang Beroperasi kembali”, 12 Maret 2010, <http://www.bumn.go.id/pelindo1/en/berita/661/KAPAL-RO-RO.MEDAN-PENANG.BEROPERASI.KEMBALI#>

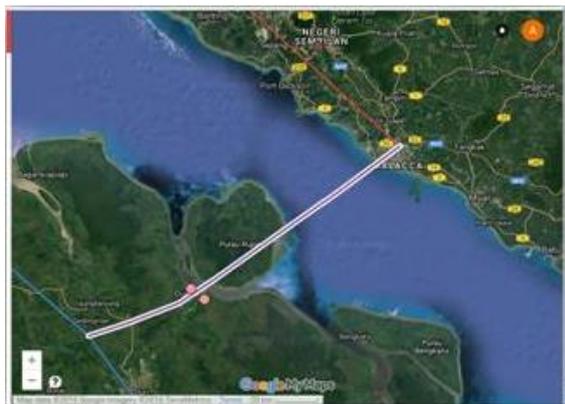
barang dalam *city to city connectivity* ini menjadi simpul koridor ekonomi lainnya dalam IMT-GT yang sangat penting. Frekuensi transportasi laut ini sangat dimungkinkan juga karena pilihan yang paling diminati daripada transportasi udara, yang dilihat dari jarak yang begitu dekat (kurang lebih 10 menit) menjadi sesuatu yang mungkin kurang diminati. Di samping itu, Melaka tampil dengan 4 pelabuhan maritim (Melaka, Sungai Linggi, Port Dickson, Port Klang),²¹ sehingga wajar jika transportasi laut lebih banyak diminati.

Koridor ini secara fisik berjarak dekat dengan Kantor Perwakilan JBC Indonesia di Pekanbaru. Pekanbaru berperan penting bagi Melaka karena kebutuhannya dengan pasok energi listrik dari Pekanbaru dibawah “the Melaka-Pekanbaru Power Interconnection”. Melaka sangat membutuhkan sumber listrik bagi industrinya, Kebutuhannya atas pasok listrik ini sudah terprogram dalam *Implementation Blueprint* IMT-GT 2012-2016 “The Melaka–Pekanbaru Power Interconnection will involve construction of a 500 kilo-Volt (kV) high voltage direct current (HVDC) power transmission line between Malacca and Pekanbaru”. Dan saat ini memasuki *Implementation Blueprint* IMT-GT 2017-2021 kebutuhan pasok listrik ini masih akan berlangsung.

Peta dibawah memperlihatkan konektivitas Dumai-Melaka dengan Dumai sebagai penghubung antara Sumatera dengan wilayah Melaka. Peran penghubung ini tidak berhenti di simpul ini, melainkan berlanjut ke koridor ekonomi lainnya di Selat Malaka (koridor 2) maupun di Sumatera (koridor 3, tentang hal ini bisa lihat Peta 1). Baik Indonesia maupun Malaysia sedang memperkuat pembangunan infrastruktur sebagaimana yang direncanakan dalam IMT-GT. Indonesia dimulai dari dua kepemimpinan (Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo) tengah mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan seperti Trans Sumatera dan di wilayah Indonesia lainnya, juga sebagai upaya untuk mendukung program terkait dengan IMT-GT. Demikian juga dengan Malaysia sedang menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan program *the National Transformation Policy* (2011-

²¹ IMT-GT, *Implementation Blueprint 2012 – 2016*, hlm. 17.

2020) inipun juga dalam kaitannya dengan target pembangunan konektivitasnya IMT-GT. Alur keterkaitan pembangunannya dimulai dari pembangunan di masing-masing negara, kemudian terhubung dengan program bilateral (seperti *city to city connectivity* Dumai – Melaka, dan *city to city connectivity* Medan – Pulau Penang). Setelah itu berlanjut dan masuk ke konektivitas yang lebih luas seperti IMT-GT, dan akhirnya ke ASEAN *connectivity*.



Gambar 4. Peta Konektivitas Koridor Ekonomi Dumai–Melaka

Sumber: “IMT-GT-ProjectMap”, https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ts4s2b1xSbQScFMEd8pNALcU9HA&hl=en_US diakses pada 08 Oktober 2016.

Koridor Dumai–Melaka menjadi destinasi bagi lintas manusia dengan beragam tujuan seperti kunjungan wisata, tenaga kerja, urusan bisnis ke Malaysia. Di Melaka banyak menawarkan paket-paket wisata dengan sasaran mayoritas turis dari Sumatera (termasuk wilayah Indonesia lainnya) untuk berkunjung ke Melaka. Sementara Dumai sebagai kota yang tengah berkembang, menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku bisnis Malaysia untuk berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit. Dumai menjadi ladang bisnis bagi investor yang bergerak di sektor industri, sehingga tidak sedikit pelaku bisnis Malaysia yang datang ke Dumai. Banyaknya ekspatriat yang bekerja di Dumai (bekerja di Chevron) dan untuk menyediakan suplai logistik, mendorong pemerintah daerah untuk mendukung kecukupan kebutuhan pangan. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku bisnis Malaysia untuk mengisi kebutuhan

rantai ekonomi itu, dengan mengeksport makanan-makanan kecil ke beberapa supermarket, termasuk obat-obatan, serta alat-alat rumah tangga.²² Peluang bisnis menjadi hidup melalui Koridor Ekonomi Dumai-Melaka.

Dumai terbuka pula untuk kunjungan dari wilayah Sumatera lainnya. Paket wisata kesehatan atau *Medical Tourism* digalakkan pula oleh Melaka. Sektor ini berkembang cukup pesat, faktor biaya pengobatan yang lebih murah dengan fasilitas kesehatan yang jauh lebih lengkap daripada yang ada di Sumatera ataupun Jakarta dan Singapura menjadi pertimbangan utama.²³ Peluang bisnis juga dimanfaatkan oleh *Travel Mart* yang membuka kerja sama dengan pelaku industri wisata dari Malaysia dan Riau untuk meluncurkan paket wisata dibidang pelayanan kesehatan seperti *Mahkota Medical Center*, *Hospital Pantai*, *Putra Specialist Hospital*.

Manfaat *city to city connectivity* Dumai–Melaka menjadi simpul ekonomi bagi Malaysia untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan sektor *medical tourism* ini, karena bagi Melaka khususnya, dirinya harus bersaing ketat dengan paket-paket serupa dari Thailand maupun Singapura. Untuk itu, Pemerintah Malaysia menyediakan anggaran sejumlah RM 20 juta per tahun untuk kegiatan periklanannya, serta menghimbau sektor swastanya untuk turut berperan aktif.²⁴ Ini berarti bahwa pihak Malaysia sangat bergantung pada kelangsungan dan keberlanjutan *city to city connectivity* maupun koridor ekonomi ini agar tidak terkendala dengan masalah yang bisa menyusutkan arus masyarakat yang berkunjung ke Melaka. Ini juga menjadi peluang besar bagi perkembangan Dumai.

²² “Kenapa Malaysia Bernafsu Bikin Jembatan Malaka – Dumai?”, Kompasiana.com, 29 februari 2016. http://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/kenapa-malaysia-bernafsu-bikin-jembatan-malaka-dumai_56d0ec0a577b612e2f4533d6, diakses pada 08 Oktober 2016.

²³ Sebagaimana diakui oleh beberapa narasumber tim Perbatasan ketika melakukan penelitian di Medan, Mei 2016.

²⁴ *International Medical Travel Journal* (IMTJ), “Record Year For Malaysia Medical Tourism”, 27 Mei 2016, <https://www.imtj.com/news/record-year-malaysia-medical-tourism/> diakses pada 08 Oktober 2016.

Masa Depan *City to City Connectivities* bagi Malaysia dan Indonesia

Malaysia bertaruh pada simpul ekonomi ini karena anggaran yang sudah disiapkan setiap tahun harus memberi keuntungan balik bagi negeri jiran ini. Pun demikian dibawah kepemimpinan baru Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Muhamad membawa Malaysia untuk meninjau kembali pengeluaran negara yang dipandang ‘berlebihan’ untuk ditinjau ulang guna mengikis permainan elit politik dari tindak korupsi.

Meski ada kebijakan baru ini, Malaysia dibawah PM Mahathir Muhamad akan tetap menganggap penting kelanjutan pembangunan konektivitas maritim ini melalui kedua *city to city connectivities*, Medan–Pulau Penang dan Dumai–Melaka. Ada beberapa pertimbangan mendasar atas pentingnya pembangunan ini, yaitu *pertama*, selain karena hubungan kedua koridor ini sudah terbina kuat dan mengakar sejak masa lalu, maka Malaysia dibawah PM Mahathir tidak akan menghalangi kemajuan pesat yang dihasilkan dan memberi keuntungan bagi masing-masing koridor ini.

Kedua, Malaysia akan tetap memegang komitmen dalam konteks kerja sama IMT-GT, terutama karena komitmen terhadap Indonesia untuk semakin meningkatkan hubungan saling membutuhkan antara Indonesia dan Malaysia, sebagaimana dikemukakan Mahathir Muhamad sewaktu berkunjung untuk kali pertama ke Indonesia setelah terpilihnya kembali menjadi PM beberapa bulan yang lalu. Ini bisa bermakna bahwa keterhubungan antara kedua negara, terutama antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia akan tetap penting bagi jalur ekonomi (berdasar hubungan kuat sosial budaya) kedua negara di Selat Malaka.

Ketiga, dalam konteks IMT-GT yang mana PM Mahathir Muhamad sebagai salah satu pendirinya tahun 1993 (bersama Presiden Suharto dan PM Chuan Leekpai) tentu tidak menginginkan kerja sama IMT-GT (baru) tahun 2007 ini menjadi terhenti atau tidak berkembang. Karena itu, keberlangsungan program IMT-GT melalui *city to city connectivity* khususnya dengan 2 simpul koridor ekonomi yang ada akan menjadi salah satu perhatian utama, terutama

terkait dengan masalah Tenaga Kerja Indonesia yang datang ke Malaysia.

Tidak menutup mata bahwa jalur-jalur ekonomi ini rentan dan menjadi media bagi kegiatan-kegiatan ilegal. Sudah sepantasnya apabila *city to city connectivities* dalam koridor ekonomi ini masuk menjadi simpul-simpul rawan yang tak lepas dari pengawasan aparat keamanan dari kedua negara. Apalagi ditambah dengan kondisi keterhubungan yang melewati Selat Malaka.

Indonesia dibawah masa akhir kepemimpinan Joko Widodo dikenal dengan pembangunan berorientasi maritim (dikenal dengan ambisi membangun “Poros Maritim Dunia”) ini masih terus berkomitmen membangun sektor maritim. Proses pembangunan sektor maritim terus didorong termasuk simpul-simpul ekonomi yang terkoneksi dengan laut. Ada beberapa pertimbangan mengapa ini begitu penting, *pertama*, dua simpul koridor ekonomi Medan–Pulau Penang dan Dumai–Melaka menjadi faktor kunci bagi keterhubungannya dengan Malaysia. Ini sangat penting karena kedua koridor ini adalah jembatan (bagi wilayah Sumatera termasuk Aceh) menuju Semenanjung Malaysia untuk kemudian terkoneksi lanjut dengan simpul-simpul ekonomi lainnya di daratan ASEAN.

Kedua, melalui kerangka kerja sama IMT-GT, Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo menargetkan jalur Trans Sumateranya (koridor 3) ini bisa menguatkan dan melancarkan akses menuju simpul-simpul koridor ekonomi dengan Semenanjung Malaysia. Karena keberlangsungan dua simpul koridor ini menjadi andalan bagi dinamika *crossborder maritime connectivity* baik di Medan maupun di Dumai.

Ketiga, dua koridor ini menjadi pendukung bagi pembangunan infrastruktur maritim di kawasan barat Indonesia, yang mana Medan dengan pelabuhan Belawan maupun Kualatanjung sebagai pelabuhan baru bertaraf internasional, yang terus diperkuat untuk mengimbangi pelabuhan-pelabuhan taraf internasional negeri Jiran. Malaysia sudah terlebih dulu membangun pelabuhan-pelabuhan handal (Port Klang, Port Dickson, Tanjung Pelepas) dan sedang diperkuat terus untuk mengejar kecanggihan pelabuhan

Singapore. Menyaingi pelabuhan pelabuhan itu dengan standar dan taraf yang sama dengan pelabuhan-pelabuhan mereka mungkin menjadi usaha berat karena *capacity building* Indonesia yang belum sebanding. Namun, hal ini tetap harus dilakukan, setidaknya upaya pembangunan infrastruktur pelabuhan Indonesia harus terus ditingkatkan, sehingga mampu mempersempit gap antara fasilitas pelabuhan di Sumatera dengan pelabuhan-pelabuhan di negeri Jiran.

Di masa depan bentuk kerja sama dalam kapasitas *city to city connectivity* disektor *cross border maritime corridor* akan tetap menjadi penting bagi kedua negara, dan juga bagi kerangka IMT-GT. Bagi Indonesia, Medan dengan 2 pelabuhannya (Belawan dan Kualatanjung) dan Dumai dengan pelabuhan regionalnya akan tetap menjadi jalur nadi ekonomi penting dengan Malaysia. Seberapa pentingnya ini bagi Malaysia bisa dicerminkan dari adanya keinginan Malaysia untuk membangun jembatan antara Dumai (melalui Pulau Rupa sebagai pulau terluar) dan Melaka pada beberapa tahun yang lalu. Namun keinginan ini nampaknya tidak ditanggapi serius oleh Indonesia, apalagi dimasa kepemimpinan Joko Widodo yang lebih mengoptimalkan pembangunan industri maritim termasuk transportasi laut.

Penutup

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Konektivitas (*connectivity*) menjadi kata kunci dalam era globalisasi. Dengan konektivitas (infrastruktur, kelembagaan, antarmasyarakat) bisa ‘menyatukan’ manusia dalam dunia ‘tanpa batas’ demi mengejar tujuan bersama dalam sebuah wadah kerja sama. Kerangka *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Apalagi konektivitas antara Sumatera dengan Semenanjung Malaysia yang terpisah dengan Selat Malaka, ternyata bukan menjadi penghalang bagi mereka.

Hubungan kerja sama antara dua wilayah Selat Malaka ini sudah terbangun sejak dahulu. Faktor kesamaan budaya dan bahasa relatif lebih

mudah menyatukan dan mengeratkan mereka dalam membangun kerangka kerja sama yang lebih formal, terikat dalam kesepakatan yang sudah dihasilkan dalam tingkat negara, seperti IMT-GT. Secara umum, *City to city connectivity* pada koridor ekonomi Medan–Pulau Penang dan koridor ekonomi Dumai–Melaka menjadi dua simpul ekonomi yang menghidupkan *cross border maritime connectivity* dengan beragam aktivitas. *Pertama*, peluang bisnis terbuka luas bagi sektor swasta yang memang menjadi pemain utama dalam dinamika koridor ekonomi ini. *City to city connectivity* cakupannya lebih laus, termasuk didalamnya unit koridor ekonomi yang dibangun oleh pelaku-pelaku ekonomi. Dua simpul koridor, baik Dumai–Melaka maupun Medan–Pulau Penang menawarkan paket *medical tourism* beserta turunan ekonominya, seperti hotel, restoran, penyediaan obat (baik organik maupun non organik), lalu tujuan studi, industri kelapa sawit, urusan perniagaan (komoditas), tujuan bekerja, saling kunjung kerabat dan sebagainya.

Kedua, menjadi media bagi mobilitas manusia, barang dan jasa yang hendak lanjut ke wilayah-wilayah lain yang terhubung dalam jalur-jalur fisik yang lebih jauh. Hal ini berlaku bagi manusia yang masuk ke Pulau Penang dan Melaka untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke jalur koneksi hingga ke Thailand dan negara-negara ASEAN utara lainnya. Begitu pula sebaliknya, manusia yang masuk ke Medan maupun Dumai bisa terhubung dengan mudah ke wilayah Sumatera lainnya. *Ketiga*, namun kemudahan akses seperti ini juga patut diwaspadai atas kemungkinan maraknya kegiatan ilegal yang tidak terjangkau mudah oleh para aparat keamanan. Apalagi dua koridor ekonomi ini melintasi Selat Malaka, sebuah jalur laut yang tak pernah ‘tidur’.

Secara singkat, dua koridor ekonomi yang lekat pada *city to city connectivity* ini sangat dinamis dan menjadi “backbone” bagi kerja sama subregional IMT-GT. Di masa depan, bentuk konektivitas ini masih akan memainkan peran kunci bagi kedua negara. Indonesia dibawah era Presiden Joko Widodo dan bagi siapapun pemimpin berikutnya akan tetap melihat bentuk konektivitas ini penting, karena secara umum,

wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dalam konteks IMT-GT menjadi negara yang terpisah dengan laut dari dua negara anggota lainnya, yaitu Malaysia dan Thailand. Sedangkan bagi Malaysia, keterhubungannya dengan Sumatera menjadi penting bagi perekonomian nasionalnya, apalagi dibawah kepemimpinan baru, Perdana Menteri Mahathir Muhamad yang melihat pentingnya meningkatkan secara lebih baik lagi urusan kebutuhan tenaga kerja dengan Indonesia. Ini penting karena, salah satu penunjang pembangunan di Malaysia adalah dibutuhkannya para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor infrastruktur maupun non infrastruktur.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Nathalie Fau, Sirivanh Khonathapane dkk. *Transnational Dynamics in Southeast Asia, the Greater Mekong Subregion and Malacca Straits Economic Corridors*. Singapore: ISEAS. 2014.
- Fau, Nathalie. "Poor Maritime Connectivity in The Straits of Malacca". *The Newsletter*. No. 63. (2013).
- Spring. Diunduh dari http://www.ias.asia/sites/default/files/IIAS_NL63_4041.pdf, pada 21 September 2016.
- Gochhayat, Artatrana. "Regionalism and sub-regionalism: A theoretical framework with special reference to India". *African Journal of Political Science and International Relations*, Vol. 8. 1 (2014). Diunduh dari https://www.academic-journals.org/article/article1393314864_Gochhayat.pdf.
- Raharjo, Sandy Nur Ikkal (et all). Research Summary "The Role of IMT-GT Cooperation in The ASEAN Connectivity Development." *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 14. No. 1 (Juni 2017).

Sumber Internet dan Lainnya

- "Health Tourism in IMT-GT Area", in IMT-GT Project Map, diakses dari https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ts4s2b1xSbQScFMEd8pNALcU9HA&hl=en_US pada 08 Oktober 2016.
- IMT-GT, *Implementation Blueprint 2012 – 2016*.
- International Medical Travel Journal (IMTJ)*, "Record Year For Malaysia Medical Tourism", 27

Mei 2016, diakses dari <https://www.imtj.com/news/record-year-malaysia-medical-tourism/>.

- "KJRI Gelar GELAR "Business Matching" Sumut-Pulau Penang", *Harian Jurnal Asia*, diakses dari <https://www.jurnalasia.com/seremoni/kjri-gelar-gelar-business-matching-sumut-pulau-penang/>, pada 7 Oktober 2016.
- "Kadin Jateng Kerja Sama Pasarkan Furniture", 23 Desember 2013, diakses dari <http://www.yiela.com/view/3421640/kadin-jateng-kerja-sama-pasarkan-furnitur>, pada 08 Oktober 2016.
- "Kenapa Malaysia Bernafsu Bikin Jembatan Malaka-Dumai?". 29 februari 2016. Diakses dari http://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/kenapa-malaysia-bernafsu-bikin-jembatan-malaka-dumai_56d0ec0a577b612e2f4533d6, pada 08 Oktober 2016.
- "The Context of IMT-GT Implementation Blueprint 2017-2021", diakses dari <http://imtgt.org/the-context-of-imt-gt-implementation-blueprint-2017-2021/> pada 17 Juni 2018.
- The Free Dictionary by Farlex, <http://www.thefreedictionary.com/connectivity>, diakses pada 20 September 2016.
- The ASEAN Secretariat, "Master Plan on ASEAN Connectivity", Jakarta, ASEAN Secretariat, 2011, diakses dari http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/4_Master_Plan_on_ASEAN_Connectivity.pdf, pada 21 September 2016.
- The ASEAN Secretariat, "Master Plan on ASEAN Connectivity 2025", Jakarta, ASEAN Secretariat, 2016, hlm. 39. Diakses dari <http://asean.org/storage/2016/09/Master-Plan-on-ASEAN-Connectivity-20251.pdf>, pada 15 Juni 2018.

TENTANG PENULIS

Indriana Kartini

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Saat ini penulis tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI. Penulis dapat dihubungi melalui email: indriana.kartini@gmail.com

Meutya Viada Hafid

Penulis merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar sejak 2009 hingga kini. Lahir di Bandung pada 3 Mei 1978 dan memulai karirnya sebagai jurnalis di Metro TV. Penulis menyelesaikan pendidikan pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. adapun penulis dapat dihubungi melalui email: meutyahafidinfo@gmail.com

Arif Novianto

Penulis merupakan Asisten peneliti di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Peneliti di Pusat Studi Jerman UGM pada tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

Lukman Kurniawan

Penulis merupakan Alumnus Departemen Sosiologi FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman pada tahun 2015.

Samodra Wibawa

Penulis merupakan Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman.

Siswanto

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia. Tergabung dalam tim penelitian Politik Luar Negeri, penulis sudah banyak menghasilkan karya-karya baik buku maupun jurnal. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: sish_jakarta@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang kajiannya adalah perbatasan. Sudah banyak karya berupa buku maupun jurnal yang ditulis oleh beliau. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: irewati62@gmail.com

M. Fakhry Ghafur

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tergabung dalam tim penelitian Agama dan Politik. Bidang kajiannya meliputi Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Penulis dapat dihubungi di email: fachryghafur@gmail.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis merupakan peneliti madya di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fokus kajiannya adalah Otonomi dan Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Penulis dapat dihubungi melalui email: nyimas.letty@gmail.com; nyimas.letty@yahoo.com

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan kandidat peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia merupakan Alumnus *Global Studies Programme Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg*, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

